ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice*, serta 2) kendala dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice* di Polresta Jambi. **Rumusan masalah** dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice* di Polresta Jambi; dan 2) Apa sajakah kendala dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice* di Polresta Jambi. **Metode penelitian** adalah tipe penelitian yuridis empiris. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice* di Polresta Jambi dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 maupun Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Seluruh tahap pelaksanaan telah disesuaikan dengan tata cara penyelesaian tindak pidana ringan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, dimana pendekatan *restorative justice* tidak hanya diperuntukkan bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat maupun luka ringan, tetapi juga diberikan kepada pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia. Hal ini menyebabkan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice* di Polresta Jambi kurang sesuai dengan syarat-syarat *restorative justice* dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 maupun Perpol Nomor 8 Tahun 2021. 2) Kendala dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice* meliputi faktor kebudayaan berupa anggapan masyarakat bahwa *restorative justice* belum mampu memberikan hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, serta faktor masyarakat berupa sikap keluarga korban yang beranggapan adanya *restorative justice* belum bisa mewakili pertanggungjawaban bagi pelaku, serta sikap korban maupun keluarganya yang terkadang meminta ganti rugi lebih besar sebagai bentuk pertanggungjawaban

Kata kunci : *restorative justice*, kecelakaan lalu lintas